



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Lengkung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi,



kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Lengkong Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Lengkong Kota Bandung Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

#### **B. Gambaran Umum Kecamatan Lengkong**

Kecamatan Lengkong merupakan salah satu dari 30 kecamatan yang ada dalam wilayah Administrasi Pemerintah Kota Bandung memiliki luas wilayah kurang lebih 574 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sumur Bandung
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bandung Kidul.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Regol.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batununggal



Gambar 1.2

Peta Wilayah Kecamatan Lengkung



Letak wilayahnya berada pada permukaan geografis yang datar dengan curah hujan kurang lebih 2.460 mm/th dan dilalui oleh 2 buah sungai yaitu Sungai Cikapundung dan Sungai Cikapundung Kolot.

Kecamatan Lengkong membawahi 7 Kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Malabar
2. Kelurahan Burangrang
3. Kelurahan Lingkar Selatan
4. Kelurahan Cikawao
5. Kelurahan Paledang
6. Kelurahan Turangga dan
7. Kelurahan Cijagra

***Pembagian Wilayah Kecamatan Lengkong***

No.	KELURAHAN	JUMLAH	
		RW	RT
1.	Malabar	11	58
2.	Burangrang	9	65
3.	Lingkar Selatan	10	74
4.	Cikawao	9	55
5.	Paledang	8	43
6.	Turangga	11	84
7.	Cijagra	7	52
<b>Jumlah</b>		<b>65</b>	<b>431</b>

*Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Lengkong Tahun 2018*

Gambar 2.2

Di dalamnya terdapat 65 Rukun Warga ( RW ), 431 Rukun Tetangga ( RT ) dan jumlah penduduk di Kecamatan Lengkong sampai dengan akhir Bulan Desember Tahun 2018 tercatat laki-laki sebanyak 33.094 jiwa dan perempuan sebanyak 33.304 jiwa dengan jumlah



sebanyak 66.398 Jiwa, dan 16.233 Kepala Keluarga, dengan kepadatan penduduk rata-rata 125 orang per hektar.

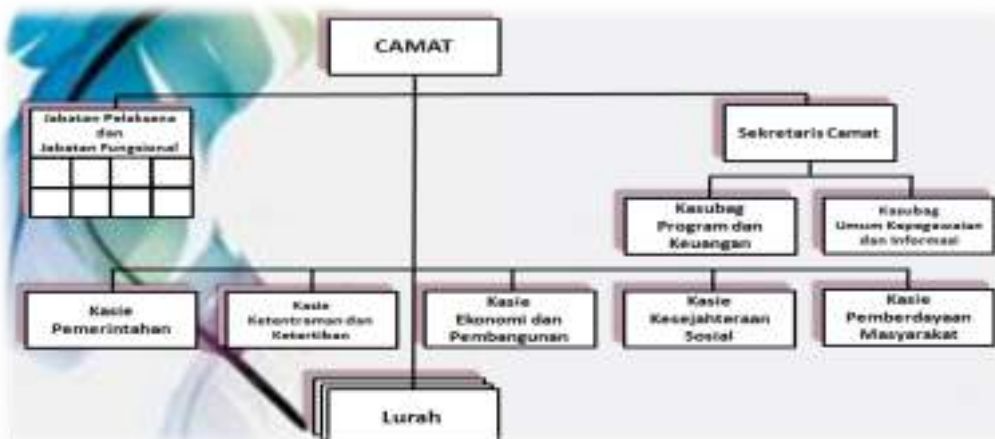
### C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban :

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Lengkong mempunyai fungsi :

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh TB. AGUS MULYADI yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Lengkong**



### D. Isu Strategis

Dalam menguraikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan di Kecamatan Lengkong yang merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan



sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan lain serta mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan penyelenggaraan Program dan Kegiatan

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan berdasarkan evaluasi capaian kinerja RPJMD Tahun 2013-2018, berdasarkan evaluasi capaian kinerja bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan mengenai berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara



faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan Lengkong dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan dan teknis operasional dapat diuraikan berikut ini :

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Lengkong dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Lengkong sebagai berikut:

1. Berdasarkan survey kepuasan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Lengkong pada rata-rata Kecamatan dan Kelurahan tahun 2017, sebanyak 1 kelurahan yang memperoleh capaian IKM di dibawah 80,00. Akan tetapi kualitas pelayanan publik tetap menjadi orientasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Lengkong. Selain belum seluruh kelurahan mencapai kinerja yang baik, standar pelayanan di Kecamatan Lengkong perlu ditingkatkan lebih tinggi dan standar survei kepuasan masyarakat yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Terkait standar pelayanan publik di Kecamatan Lengkong perlu dilakukan reviu dalam rangka perbaikan berkelanjutan, mengingat standar yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI masih berorientasi pada pemenuhan atau dimensi *tangible*. Permasalahan lainnya yang dirasakan oleh masyarakat adalah ketidaktepatan mekanisme, waktu, dan biaya layanan. Hal ini memerlukan perbaikan secara berkesinambungan.



2. Permasalahan penanganan banjir/ genangan di Kecamatan Lengkong sangat erat kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan drainase, dan sumber daya air. Penanganan permasalahan genangan di Kecamatan Lengkong saat ini masih belum optimal karena di beberapa titik lokasi banjir / genangan belum dapat terselesaikan. Penyebab dari banjir / genangan adalah kurangnya kapasitas drainase primer, belum terintegrasinya saluran drainase, dan belum optimalnya kualitas saluran drainase sekunder dan tersier atas kiriman air dari wilayah atas. Permasalahan yang terkait drainase primer adalah pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan tidak tertatanya kawasan sempadan sungai akibat pelanggaran pemanfaatan ruang, sedangkan permasalahan terkait drainase sekunder dan tersier adalah tidak optimalnya kapasitas saluran drainase sekunder dan tersier, belum optimalnya inspeksi saluran drainase, dan desain teknis drainase yang bermasalah;
3. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung dimana Kecamatan Lengkong merupakan salah satu SKPD di dalamnya; Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Lengkong dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Lengkong, sebagai berikut:
  1. Ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebesar 70%;
  2. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
  3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD;
  4. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
  5. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan;
  6. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;





7. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap PBJ (metode swakelola).
8. Masih kurangnya kesadaran lembaga kemasyarakatan yang belum mengutamakan kepentingan masyarakat dengan masih mementingkan kebutuhan kesekretariatan, kegiatan rutinitas dan kepentingan kepengurusan sendiri;
9. Masih banyak belum dilakukan rembug warga ditingkat RW sebagai dasar untuk usulan PIPPK dalam musrenbang

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Lengkong, sebagai berikut

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Program dan Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan kepada Pemerintah Kota Bandung;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan.
4. Perencanaan kegiatan yang dilakukan PPTK masih belum berbasis kinerja sehingga masih banyak belum mendukung outcome.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Lengkong sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang kewenangannya dilimpahkan sebagian oleh Walikota adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Lengkong, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Lengkong Kota Bandung antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;



4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Lengkong Kota Bandung adalah:

1. Adanya multi interpretasi terhadap perencanaan keuangan terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang masih pemanfaatannya rutinitas, hal ini disebabkan aturan PIPPK belum secara spesifikasi;
2. outcome dari program pemberdayaan masyarakat masih menunjukkan hasil yang belum optimal;
3. Banyak kegiatan yang belum didukung oleh anggaran yang memadai;
4. Belum adanya koordinasi vertikal yang baik dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
5. Masalah utama yang dihadapi Kota Bandung adalah tidak dimilikinya fasilitas Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS). TPPAS yang digunakan saat ini merupakan TPA yang bersifat sementara dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan usia pakainya akan segera berakhir. Dengan pola pengelolaan sampah Kota Bandung yang masih bertumpu pada pola Kumpul – Angkut – Buang, maka permasalahan TPA ini akan menjadi masalah besar di kemudian hari apabila tidak segera diantisipasi. Karenanya, perubahan pola pengelolaan mutlak diperlukan, diantaranya dengan mengintensifkan pola pengelolaan sampah secara 3R (Reduce, Reuse dan Recycle);
6. Masih cukup banyak titik parkir dan PKL di badan jalan dan trotoar yang mengurangi kapasitas jalan.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Lengkong Kota Bandung dalam kurun waktu 2018-2023, adalah sebagai berikut :



### **1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)**

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

### **2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Barang**

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain hal itu sumber daya



aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Lengkung dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.



Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada



masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;
- (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
- (3) Pengamanan barang daerah;
- (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

### **3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu:

## **“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”**

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:



- Bandung** : *Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang,*
- Unggul** : *Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik di setiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.*
- Nyaman** : *Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan,*
- Sejahtera** : *Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad.*



*Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.*

**Agamis** : *Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan*

Dengan demikian visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis bermakna “*Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur, dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat*”.





Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing  
*Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.*
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani  
*Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima*
3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan  
*Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal*
4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan  
*Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya*



*dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan*

5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi

*Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta*

### **E. Landasan Hukum**

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

### **F. Sistematika**



Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2019 adalah :

**BAB I    PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

**BAB II    PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu.

**BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

**BAB IV    PENUTUP**



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **1.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Kecamatan Lengkung Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Lengkung Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Lengkung Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Lengkung Nomor 100/024-Kec.Lkg Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Lengkung Kota Bandung Tahun 2019-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Lengkung Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Lengkung Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Lengkung Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan



RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Lengkong Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Lengkong Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Lengkong Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lengkong Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Lengkong Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### 1. *Visi*

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Lengkong Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Kecamatan Lengkong Kota Bandung Tahun 2019-2023 adalah :

### **Terwujud Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis (Visi Pemerintah Kota Bandung)**

#### 2. *Misi*

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Lengkong Kota Bandung Tahun 2019-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang melayani, efektif, Efisien dan Bersih ( Misi 2 Pemerintah Kota Bandung)
- b. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi ( Misi 5 Pemerintah Kota Bandung)

#### 3. *Tujuan dan Sasaran*

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan



dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Lengkung Tahun 2019-2023 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Lengkung Kota Bandung sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja  
Kecamatan Lengkung Kota Bandung**

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				201 9	202 0	202 1	202 2	202 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Lengkung	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lengkung	81	82	82.5	82.75	83
			Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat	100	100	100	100	100



			waktu					
		Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	50	55	60	65	70
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	75.3	65	68	70	72

### B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : .....Tahun ..... tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2019-2023.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lengkung Kota Bandung tahun 2019 adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Lengkong Kota Bandung Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Lengkong	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lengkong	Nilai	Merupakan Tugas dan Fungsi OPD dengan menggunakan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Rata-rata IKM Kecamatan dan Kelurahan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	% Rata-rata RW Unggul + LKK Unggul + Siskamling Aktif	% RW Unggul (Metode Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dan 7 dari 16 Kriteria RW Unggul) meliputi :Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat :1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah3. Terdapat kelompok





						<p>masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester5. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya selain pengangkutan sampah dari rumah ke TPSKriteria RW Unggul, terdapat minimal melaksanakan / terdapat 7 dari 16 jenis kondisi dibawah ini :1. Satu Kampung Satu Taman Bermain;2. Balai RW/Markas Karang Taruna;3. Sanggar seni Sunda (Jaipongan/Kecap i Suling, perguruan silat, Rebana/Tagoni dll)4. Biopori/Sumur resapan tiap rumah dan jalan/gang;5. Gapura Kujang;6. Satu Kampung Satu Produk;7. Kampung Berkebun;8. Kampung Caang Baranang;9. MCK komunal;10. Pavingisasi11. Gerakan satu rumah satu tanaman;12.</p>
--	--	--	--	--	--	---



						<p>Movie on the move (Layar tancep)/Nonton Bareng13. Media Kampanye Kampung Unggul14. Satu Rumah satu jumantik15. Laporan RW tepat waktu minimal form A :a. Laporan Kependudukan (Format A1-A5)b. Laporan Program KangPisMan sampah di wilayah RW (Format B dan C)c. Usulan Aspirasi Masyarakat dan Potensi Swadaya Murni16. RW berdayaa. Ada kepengurusanb. Ada kegiatan pengumpulan ziswa (Zakat, Infak, Shodakoh dan Wakaf)Adanya kegiatan sosial yang dibiayai hasil ziswa (zakat, infak, shodakoh dan wakaf)% LKK UnggulKriteria LKK Aktif :1. Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan mempunyai rencana/ agenda/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup LKK</p>
--	--	--	--	--	--	---



						<p>(Kecamatan/Kelurahan)2. Minimal 60% Ketua / Pengurus Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan3. Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan melaksanakan minimal 75% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalanAktif mengikuti kegiatan / lomba/kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan dalam satu tahun% Siskamling RW AktifKriteria Siskamling Aktif :1. Adanya Pengurus2. Adanya Kelompok Siskamling3. Adanya Jadwal Siskamling4. Adanya Buku Jaga Kegiatan SiskamlingApabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)</p>
--	--	--	--	--	--	---



### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Lengkung Kota Bandung Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Lengkung Kota Bandung Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019, Kecamatan Lengkung Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

**Perjanjian Kinerja Kecamatan Lengkung Kota Bandung  
Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Lengkung	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lengkung	81
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	100
2	Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	50



3	Meningkatnya Pembedayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	75.3
---	-------------------------------------	---	------

## 1.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Lengkong yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lengkong Tahun 2019, sebagai berikut :

### A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan Lengkong terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Lengkong Tahun 2019

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Kecamatan Lengkong di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Kecamatan Lengkong Tahun 2019 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :



**Table 2.4**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu**  
**Kecamatan Lengkung Kota Bandung**

<b>N O</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Lengkung	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lengkung	Nilai	81	82	82.5	82.75	83
			Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100	100	100	100	100
		Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	55	60	65	70
2	Optimalisasi Tingkat	Meningkatnya	Tingkat Pemberdayaa	%	75.3	65	68	70	72



	Pemberday aan Masyarakat	Pemberday aan Masyarakat	n Lembaga Kemasyaraka tan						
--	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

**B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu**

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lengkong serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lengkong hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



**Tabel 2.5**

**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu  
Kecamatan Lengkung Kota Bandung Tahun 2019**

<b>N O</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>ALASAN</b>	<b>FORMULASI/CARA PENGUKURAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>KETERANGAN/KRITERIA</b>
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Lengkung	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lengkung	Nilai	Merupakan Tugas dan Fungsi OPD dengan menggunakan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan		9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		Persentase temuan BPK/Inspektora t yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	Merupakan PK dan Meminimalisasi temuan dalam rangka mewujudkan Bandung WTP	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti tepat		Tindaklanjuti Temuan Inspektorat/BPK





2	Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	Merupakan PK Pelimpahan kewenangan dan dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota dan pelimpahan kewenangan	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul di bawah ini : 1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib) - Ada kepengurusan - Ada program kerja - Mengikuti pelatihan - Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang - Melakukan penyuluhan /motivasi kepada	Kriteria Kelurahan Unggul : memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 12 jenis kondisi
---	--	-----------------------------	---	--	--	--



Kecamatan Lengkung

					masyarakat 2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana) - Ada Kepengurusan - Gardu Sosial - Lumbung sosial - Peta Rawan Bencana - Melakukan penyuluhan kepada masyarakat kesiapsiagaan bencana 3. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca - Memiliki koleksi buku		
--	--	--	--	--	---	--	--



Kecamatan Lengkung

					dange; 30 exp - Koran2 / majalah langangan kelurahan - Ada laporan pengunjung 4. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah - petunjuk arah ke masjid - ada Peningat /himbauan sholat berjamaah/alm waktu sholat 5. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) - SK / SP - Ada Program Kerja - Monitoring Rawan		
--	--	--	--	--	---	--	--



Kecamatan Lengkung

					Jentik - Melaksanakan penyuluhan/ himbauan perminggu - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan perkelurahan (PM) - Data terpilah - satgas Pengarusutamaan gender (PUG) - Pelatihan pelatihan - Perlindungan bagi perempuan (KDRT) 7. Pusat pelayanan dan		
--	--	--	--	--	--	--	--



Kecamatan Lengkung

					<p>kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) - Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK - Memiliki data anak - Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA - Monitoring dan evaluasi 8. Septic Tank Komunal (Ekbang) - Minimal untuk 5 rumah - Jarak dengan sumber air bersih dange; 11 meter - Resapan menggunakan</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--



Kecamatan Lengkung

					<p>pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga - Menggunakan pipa paralon - Menggunakan bak kontrol 9. Bank sampah per kelurahan (Ekbang) 10. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang) - Anggota Koperasi dange; 20 orang - Adanya perangkat organisasi : Rapat</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--



Kecamatan Lengkong

					Anggota, Pengurus Pengawas - Memiliki Akte Pendirian - Ada usaha simpan pinjam 11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang) Kriteria: a. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan b. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan c. Pada		
--	--	--	--	--	--	--	--



Kecamatan Lengkung

					<p>saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan d. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan amblas e. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering f. Melakukan penyiraman pada musim kemarau</p> <p>12. Pembentukan</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--





					Koperasi ditempat ibadah (Ekbang) - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART		
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	% Rata rata RW Unggul + LKK Unggul + Siskamling Aktif		% RW Unggul (Metode Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dan 7 dari 16 Kriteria RW Unggul) meliputi : Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat : 1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga 2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah 3. Terdapat kelompok



Kecamatan Lengkung

							masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R 4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester 5. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya selain pengangkutan sampah dari rumah ke TPS Kriteria RW Unggul, terdapat minimal melaksanakan / terdapat 7 dari 16 jenis kondisi dibawah ini : 1. Satu Kampung Satu Taman Bermain; 2. Balai RW/Markas Karang Taruna; 3. Sanggar seni Sunda (Jaipongan/Kecapi
--	--	--	--	--	--	--	--



Kecamatan Lengkung

							<p>Suling, perguruan silat, Rebana/Tagoni dll) 4. Biopori/Sumur resapan tiap rumah dan jalan/gang; 5. Gapura Kujang; 6. Satu Kampung Satu Produk; 7. Kampung Berkebun; 8. Kampung Caang Baranang; 9. MCK komunal; 10. Pavingisasi 11. Gerakan satu rumah satu tanaman; 12. Movie on the move (Layar tancep)/Nonton Bareng 13. Media Kampanye Kampung Unggul 14. Satu Rumah satu jumantik 15. Laporan RW tepat waktu minimal form A : a. Laporan Kependudukan (Format</p>
--	--	--	--	--	--	--	--



Kecamatan Lengkung

							A1-A5) b. Laporan Program KangPisMan sampah di wilayah RW (Format B dan C) c. Usulan Aspirasi Masyarakat dan Potensi Swadaya Murni 16. RW berdaya a. Ada kepengurusan b. Ada kegiatan pengumpulan ziswa (Zakat, Infak, Shodakoh dan Wakaf) Adanya kegiatan sosial yang dibiayai hasil ziswa (zakat, infak, shodakoh dan wakaf) % LKK Unggul Keriteria LKK Aktif : 1. Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan mempunyai rencana/
--	--	--	--	--	--	--	--



Kecamatan Lengkung

							<p>agenda/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup LKK (Kecamatan/Kelurahan)</p> <p>2. Minimal 60% Ketua / Pengurus Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan</p> <p>3. Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan melaksanakan minimal 75% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan</p> <p>Aktif mengikuti kegiatan /</p>
--	--	--	--	--	--	--	--



Kecamatan Lengkung

								lomba/kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan dalam satu tahun % Siskamling RW Aktif Kriteria Siskamling Aktif : 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)
--	--	--	--	--	--	--	--	---



### C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Lengkong hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Camat Lengkong dengan Walikota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**

#### **Perjanjian Kinerja Hasil Reviu**

#### **Kecamatan Lengkong Kota Bandung Tahun 2019**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>IKU / INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Lengkong	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lengkong	Nilai	81
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	75.3



### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Lengkong Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lengkong Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Lengkong.

#### **A. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu





atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Lengkong Kota Bandung  
Tahun 2019**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Lengkong Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran



dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Lengkong Tahun 2019, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lengkong berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : ....., telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

## **B. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Lengkong Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor ..... tanggal ..... dan melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : ..... tentang Indikator Kinerja Utama Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Lengkong Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Lengkong Kota Bandung tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Lengkong Kota Bandung**



## Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lengkong	Nilai	81	82.11	101.37
2	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	75.3	70.11	93.11

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lengkong, dengan capaian kinerja 101.37 %.

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, dengan capaian kinerja 93.11 %.

### C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Lengkong Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Lengkong Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Lengkong, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 4 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Lengkong Kota Bandung adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Kecamatan Lengkong Kota Bandung Tahun 2019**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lengkong	Nilai	81	82.11	101.37
2	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100	100	100.00
3	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	57.14	114.28



4	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	75.3	70.11	93.11
---	---	---	------	-------	-------

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3

## Pencapaian Kinerja Sasaran

## Kecamatan Lengkong Kota Bandung Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	50.00 %
2	Sesuai Target	25.00 %
3	Tidak Mencapai Target	25.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4

## Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	3	2	66.67	1	33.33	0	0.00
2	Misi 2	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>50.00</b>	<b>1</b>	<b>25.00</b>	<b>1</b>	<b>25.00</b>

Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Lengkong Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5

## Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
<b>A.</b>	<b>Misi 1</b>	<b>3</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	2	66.67 %
2	Sesuai Target	1	33.33 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %



<b>B.</b>	<b>Misi 2</b>	<b>1</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	1	100.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Lengkong Kota Bandung tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**Sasaran 1**

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Lengkong

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.?****Analisis Pencapaian Sasaran 1****Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Lengkong**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lengkong	Nilai			0.00	81	82.11	101.37
2	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%			0.00	100	100	100.00

Sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Lengkong dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lengkong" adalah sebesar 82.11 dari target sebesar 81 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101.37 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lengkong" tahun ini adalah sebesar 101.37 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Lengkong maka capaian kinerjanya mencapai 98.93 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Lengkong maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.



## Sasaran 2

Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.?**

### **Analisis Pencapaian Sasaran 2**

#### **Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Kelurahan Unggul	%			0.00	50	57.14	114.28

Sasaran Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Kelurahan Unggul" adalah sebesar 57.14 dari target sebesar 50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 114.28 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Kelurahan Unggul" tahun ini adalah sebesar 114.28 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Lengkong maka capaian kerjanya mencapai 81.63 %.



### Sasaran 3

#### Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.?**

#### **Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%			0.00	75.3	70.11	93.11

Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" adalah sebesar 70.11 dari target sebesar 75.3 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 93.11 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" tahun ini adalah sebesar 93.11 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Lengkong maka capaian kerjanya mencapai 102.70 %.





## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Lengkong Kota Bandung Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Lengkong Kota Bandung Tahun 2019. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Lengkong Kota Bandung Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Lengkong Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Kecamatan Lengkong Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.61 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 114.28 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 93.11 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Lengkong Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan



dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 20.036.419.368 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 19.202.939.340, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Kecamatan Lengkong Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 833.480.028

Renstra Kecamatan Lengkong Kota Bandung 2019-2023 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 1 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2019, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :


- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.61 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 114.28 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 93.11 %



Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 20.036.419.368 (dua puluh milyar tiga puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kecamatan Lengkong Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Lengkong Kota Bandung adalah 95.84 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Lengkong Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lengkong Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Lengkong Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

**Kota Bandung, 2 Januari 2020**

**CAMAT LENGKONG**  
  
**TB. AGUS MULYADI**  
**Pembina Tk.I**

NIP.19690409 198903 1 003